



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.1.PR.04.05-01 21 Januari 2022
Sifat : **SEGERA**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022

Yth.

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor SEK.1-PR.04.05.32 tanggal 17 Januari 2022 hal Permintaan Manajemen Risiko Tahun 2022, dengan ini disampaikan Dokumen Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, meliputi:

1. Matriks Manajemen Risiko pada UPR level Program (Inspektorat Jenderal);
2. Matriks Manajemen Risiko pada UPR level Kegiatan (Inspektorat Wilayah);
3. Matriks Manajemen Risiko pada UPR level Kegiatan (Sekretariat Inspektorat Jenderal);

yang telah kami susun berdasarkan hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2021, meliputi 6 (enam) tahap proses Manajemen Risiko, yaitu proses:

1. Penetapan tujuan untuk menetapkan Daftar Risiko;
2. Identifikasi Risiko untuk menetapkan Peta Risiko;
3. Analisa Risiko untuk menetapkan Peta Risiko;
4. Evaluasi Risiko untuk menetapkan Indikator Risiko;
5. Penanganan Risiko untuk menetapkan Rencana Aksi;
6. Pemantauan Risiko untuk menetapkan Realisasi atas target Indikator Risiko dan target Rencana Aksi Penanganan Risiko per semester

(terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

THOLIB

NIP. 19630811 198811 1 001

Tembusan :

-Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



INSPEKTORAT JENDERAL

MANAJEMEN RISIKO

TAHUN 2022

Piagam Manajemen Risiko

No.ITJ.UM.01.01-140 tanggal 19 Januari 2022

Surat Keputusan Inspektur Jenderal

No.ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022

**tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko pada UPR ITJEN**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2022
NOMOR : ITJ.UM.01.01-140**

Dalam rangka pencapaian sasaran unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Profil dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko (Terlampir);
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;
4. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.



Jakarta, 19 Januari 2022
Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Jenderal sebagai pemilik risiko utama berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Th.2021 Nomor 1365)
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Th.2021 Nomor 1366)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan apabila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun Indikator Kinerja, untuk segera dilakukan penyesuaian.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-I dan menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Penyusun/Pembahas Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas :
1. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
 2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Utama;

3. Melakukan....

3. Melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
 4. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 5. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.
- KEEMPAT : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun/ Pembahas/ Pemantau Manajemen Risiko mempunyai tugas membantu Tim Unit pemilik Risiko dalam proses:
1. Penetapan Tujuan berdasarkan pada Program, Sasaran, Indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan capaian kinerja;
 2. Penilaian/*Assessment* risiko meliputi :
 - a. Identifikasi Risiko dengan menetapkan pernyataan risiko, kriteria risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, dampak risiko dan pengendalian risiko. Untuk kemudian hasil identifikasi berupa Daftar Risiko;
 - b. Analisis risiko dengan menetapkan tingkat kemungkinan, tingkat dampak, tingkat risiko dan profil risiko. Untuk kemudian hasil analisis risiko berupa Peta Risiko;
 - c. Evaluasi risiko dengan menetapkan prioritas risiko, toleransi risiko, indikator risiko dan batas aman risiko;
 3. Penanganan/*Treatment* Risiko dengan menetapkan opsi penanganan risiko, kegiatan pengendalian risiko, jadwal penanganan risiko dan penanggung jawab penanganan risiko serta cadangan risiko bila ada;
 4. Pemantauan atas penanganan risiko minimal per semester dalam satu tahun anggaran bersama dengan Pejabat yang tergabung dalam Unit Pemilik risiko Inspektorat Jenderal;
 5. Menyusun Laporan Pemantauan Risiko minimal per semester paling lambat tanggal 10 semester berikutnya, untuk mengetahui *trend* risiko selama satu tahun berjalan dan menyampaikan kepada Inspektur Jenderal serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
 6. Membantu Unit Pemilik Risiko saat dilakukan evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi dan Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh APIP Inspektorat Wilayah I, dalam hal menyediakan data dukung serta pembahasan bersama dengan APIP;
 7. Melakukan proses komunikasi dan konsultasi dalam setiap tahap proses manajemen risiko;
- KELIMA : Rencana Kerja Unit pemilik risiko dan Tim Penyusun/Pembahas/pemantau Manajemen Risiko sebagaimana tertera dalam Lampiran-III Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Januari 2022

Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 19651128 199103 1 002



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Lampiran-I Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

**UNIT PEMILIK RISIKO UNIT UTAMA
DI LINGKUNGAN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA JABATAN	Jabatan Dalam Tim
1	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota
4	Inspektur Wilayah I	Anggota
5	Inspektur Wilayah II	Anggota
6	Inspektur Wilayah III	Anggota
7	Inspektur Wilayah IV	Anggota
8	Inspektur Wilayah V	Anggota
9	Inspektur Wilayah VI	Anggota

*)format Permenkumham No.5 Th.2018



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Lampiran-II Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

**TIM PENYUSUN / PEMBAHASAN / PEMANTAU
MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO UTAMA (UPR)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO	NAMA JABATAN	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
2	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris
3	Sarwadi	Anggota
4	Baneriama	Anggota
5	Indah Dwi Widyasih	Anggota
6	Joko Martanto	Anggota
7	Andi Taufik	Anggota
8	Asih Retno Sayekti	Anggota
9	Dewi Susiana Maulida	Anggota
10	Erie Wijaya	Anggota
11	Nopalisa Egitulas Vembilan	Anggota
12	Nurul Dwi Hastuti	Anggota
13	Sandra Nur Fitri	Anggota
14	Andriyanto Wahyu Prasetio	Anggota
15	Bosar Immanuel	Anggota
16	Ari Prambudi	Anggota
17	Falentina Paramita	Anggota
18	Aminullah Noor P	Anggota
19	Anton Parasian	Anggota
20	Tri sayektiningsih	Anggota
21	Een Setia S	Anggota
22	Moch.Kristanto	Anggota
23	Brahmantya Puji	Anggota
24	Prisi Khairani Arief	Anggota
25	Erviana Rahayu	Anggota



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

**RENCANA KERJA UNIT PEMILIK RISIKO DAN
TIM PENYUSUN / PEMBAHASAN / PEMANTAU
MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO UTAMA (UPR)
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Bulan												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Analisa Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester II Th.2021													Sekretaris UPR
2	Penyusunan Surat Keputusan IRJEN tentang UPR dan Tim Penyusun/Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko ITJEN													Sekretaris UPR
3	Pembahasan pertama konsep Manajemen risiko ITJEN													Tim
4	Penyampaian Nodin Ses.Itjen kepada IRWIL, Kabag dan para Koordinator serta Subkoordinator hal masukan saran atas konsep Manajemen Risiko Itjen Th.2022 hasil pembahasan pertama													Sekretaris UPR
5	Perbaikan konsep Manjamen Risiko berdasarkan masukan/saran													Sekretaris UPR
6	Penetapan Piagam Majemen Risiko													IRJEN
7	Penetapan Penerapan Manajemen Risiko													IRJEN
8	Pelaksanakan Manjemen Risiko serta proses konsultasi dan komunikasi selama satu tahun anggaran													SELURUH PEGAWAI
9	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester I													Tim
10	Pengumpulan data dukung hasil Pemantauan Manajemen risiko Semester I													Tim
11	Penyusunan Laporan pemantauan Manajemen Risiko Semester I													Sekretaris UPR
12	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester II													Tim
13	Pengumpulan data dukung hasil Pemantauan Manajemen risiko Semester II													Tim
14	Penyusunan Laporan pemantauan Manajemen Risiko Semester II													Sekretaris UPR
15	Menghadiri dan menyediakan data dukung evaluasi SPIP terintegrasi													Tim
16	Menghadiri dan menyediakan data dukung evaluasi Maturitas Manajemen Risiko													Tim
17	Tindaklanjut hasil evaluasi													Tim

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan kondisi dan arahan pimpinan



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 19651128 199103 1 002

MANAJEMEN RISIKO



**DI LINGKUNGAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2022**

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko		: INSPEKTORAT JENDERAL		
Periode Penerapan		: 2022		
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Tindaklanjut temuan belum optimal
		Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUMHAM	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif
		Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	93% Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			93% Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			6 % Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (dari jumlah yang dilakukan evaluasi WBK/WBBM oleh Tim TPI ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (67.0)	Hasil survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham
			0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat
		Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	
		Pencegahan dan penanganan Bencana	potensi kurang optimalnya kinerja ITJEN dikarenakan adanya pademi covid-19	

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : INSPEKTORAT JENDERAL
Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Tindaklanjut temuan belum optimal	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	Risiko Operasional	ITJEN	Temuan pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti	Internal dan eksternal	C dan UC	Adanya kerugian negara dan ketidakpercayaan publik atas pengelolaan laporan keuangan Kemenkumham	Kemenkumham	-Pemantauan temuan BPK -Rekon data temuan APIP dengan Satker	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham
2	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	Risiko Operasional	ITJEN	Belum melaksanakan evaluasi terpisah	Internal	C	Belum seluruh satker memahami Perka BPKP No.5 th.2021 tentang SPIP terintegrasi	Kemenkumham	Evaluasi maturitas SPIP oleh Itwil I, workshop SPIP, penyusunan Perenarapan manajemen risiko	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh
3	93% Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB" (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	Risiko Operasional	ITJEN	Pengukuran Kinerja belum terintegrasi (belum diterapkan sesuai dengan Permenpan No.8 Th.2021)	Intrenal	C	Ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenkumham	Kemenkumham	Evaluasi SAKIP, Reviu LAKP Kementerian, Workshop SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"
4	93% Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	Risiko Operasional	ITJEN	Hasil dari penilaian FAKTOR HASIL, niainya masih rendah	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpercayaan publik terhadapimplementasi reformasi birokrasi Kemenkumham	Kemenkumham	Evaluasi PMPRB, workshop PMPRB	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)
5 (MR ISO SMAP)	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Kemungkinan Sertifikasi di cabut/ gagal mempertahankan sertifikat ISO	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Tidak dilakukannya proses pengecekan secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan ISO 37001:2016 dengan kondisi terkini	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Inspektorat Jenderal	1.Melakukan kegiatan mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 2.Audit eksternal ISO SMAP oleh lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016

6 (MR Covid)	Pencegahan dan penanganan Bencana	potensi kurang optimalnya kinerja ITJEN dikarenakan adanya pademi covid-19	Terpapar nya ASN dan PPNPN ITJEN atas bencana virus covid-19	Risiko Operasional terkait bencana	ITJEN	Pegawai tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Internal dan eskternal	C dan UC	Bertambah nya kasus covid-19 di lingkungan ITJEN	Inspektorat Jenderal	-SE Menkumham - Surat IRJEN -Nodin Ses.Itjen -Jadwal WFH -Tes Antigen / PCR -Penyemprotan desinspektan -Pemberian vitamin, masker dan handsanitizer -Pemberian sinar UV di tiap ruangan	Terpapar nya ASN dan PPNPN ITJEN atas bencana virus covid-19
			Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	Internal	C	Adanya temuan audit	Inspektorat Jenderal	-SE dari Ditjen Perbendaharaan tentang penggunaan MAK untuk pembiayaan covid-19 -rekon data dengan bagian keuangan Itjen -pendampingan dari auditor	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel

KRITERIA RISIKO

- Risiko Kebijakan= Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
- Risiko Reputasi= Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
- Risiko Hukum= Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
- Risiko Keuangan= Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.
- Risiko Operasional= Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
- Risiko Pelaporan= Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
- Risiko Kepatuhan= Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko = Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan = 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan			Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	alasan	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	(tambahan)	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkumham	Hampir Pasti	Masih terdapat temuan BPK dari Th.2008 sd saat ini	4	Kementerian	5	20	Orange
2	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	moderat	data dukung pengelolaan SPIP terintegrasi (SPIP, MRI dan IEPK) tidak terdokumentasi/belum terpenuhi	3	Kementerian	5	15	Kuning
3	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	moderat	Penilaian masih dilakukan di level unit eselon I, belum ke Kanwildan UPT	3	Kementerian	5	15	Kuning
4	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	Hampir Pasti	Data dukung RB belum terkelola dengan baik, dan kurangnya kerjasama Tim RB	3	Kementerian	5	15	Kuning
5	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik	moderat	Adanya OTT atau temuan bersifat pungli/gratifikasi/ suap	3	Kementerian	5	15	Kuning
6	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham	moderat	berkurangnya jumlah responden internal dan eksternal, Adanya OTT atau temuan bersifat pungli/gratifikasi/ suap	3	Kementerian	5	15	Kuning
7 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	Sangat kecil	Tidak menyusun Program kerja Audit dan kertas Kerja Audit sesuai standar	1	Kementerian	5	5	Hijau
8 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	kecil	memanipulasi laporan karena mendapatkan suap dari satker/rekanan	2	Kementerian	5	10	Biru
9 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	kecil	Tidak melaksanakan tahapan Klausul ISO SMAP	2	ITJEN	4	8	Biru

Unit Pemilik Risiko = Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan = 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan			Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	alasan	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	(tambahan)	4	5	6	7 = 4 x 6	8
10 (MR Covid)	Terpapar nya ASN dan PPNPN ITJEN atas bencana virus covid-19	Pasti terjadi	-Untuk th.2022 masih ditetapkan status pademi covid di Indonesia dan dunia -Bencana lainnya(kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan darat/laut/udara, pencurian dll)	3	ITJEN	4	12	Kuning
11 (MR Covid)	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	kecil	Pendampingan APIP saat revisi	2	Kementerian	5	10	Biru

INDIKATOR RISIKO							
Unit Pemilik Risiko = INSPEKTORAT JENDERAL							
Periode Penerapan= 2022							
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikator	Batas Aman	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkumham	20	1	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	5,0%
2	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	15	3	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10,0%
3	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	4	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50,0%
4	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	15	5	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10,0%
5	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik	15	2	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	15,0%
6	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham	15	6	10	(mengurangi kemungkinan)	Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87,65
7 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	5	11	4	(mengurangi dampak)	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0
8 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	10	8	8	(mengurangi dampak)	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0
9 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	8	10	4	(mengurangi kemungkinan)	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0
10 (MR Covid)	Terpapar nya ASN dan PPNPN ITJEN atas bencana virus covid-19	12	7	9	(mengurangi kemungkinan)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	0
11 (MR Covid)	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	10	9	8	(mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan audit terkait pembiayaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko = INSPEKTORAT JENDERAL									
Periode Penerapan= 2022									
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	5%	Mengurangi Risiko	Reviu PIPK, reviu Revaluasi BMN	Laporan reviu PIPK dan Laporan revaluasi BMN	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
2	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1	April	Inspektorat Wilayah	-
3	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1	Juli	Inspektorat Wilayah	-
4	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1	Juli	Inspektorat Wilayah	-
5	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	15%	Mengurangi Risiko	Melaksanakan Des audit terhadap 746 satuan kerja	Laporan Desk Audit WBK/WBBM	1	April-Mei	Inspektorat Wilayah	-
6	Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87,65	Mengurangi Risiko	Melaksanakan penilaian PMPI Th.2020	Laporan Penilaian PMPI Th.2021	1	Agustus	Tim PMPI ITJEN	-
7 (PR ISO SMAP level Program)	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0	Mengurangi risiko	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1	Oktober	ITJEN	-
8 (PR ISO SMAP level Program)	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0	Mengurangi risiko	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi	Laporan Sosialisasi dan monev gratifikasi	1	Oktober	ITJEN	-
9 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0	Mengurangi risiko	Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO SMAP	Sertifikasi ISO SMAP	1	Oktober	ITJEN	-
10 (MR Covid)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	0	Mengurangi kemungkinan	Meningkatkan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Data peg ITJEN dan PPNPN terpapar covid (suspect, probabel, terdapat temuan finansial)	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN	-
11 (MR Covid)	Persentase temuan audit terkait pembiayaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0	Mengurangi kemungkinan	Mengurangi Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	jumlah temuan kesalahan penggunaan MAK covid	0	Dec-22	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	-

PEMANTAUAN RISIKO

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6= (5/4)x100	7	8	9	10= (9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
1	Reviu PIPK, reviu Revaluasi BMN	Laporan reviu PIPK/Laporan revaluasi BMN/Laporan	1			Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	5%				
2	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1			Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%				
3	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1			Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50%				
4	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1			Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%				
5	Melaksanakan Des audit terhadap 746 satuan kerja	Laporan Desk Audit WBK/WBBM	1			Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	200				
6	Melaksanakan penilaian PMPI Th.2020	Laporan Penilaian PMPI Th.2021	1			Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87,65				
7 (PR ISO SMAP level Program)	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1			Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0				
8 (PR ISO SMAP level Program)	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi	Laporan Sosialisasi dan monev gratifikasi	1			Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0				
9 (PR ISO SMAP level Program)	Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO SMAP	Sertifikasi ISO SMAP	1			Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0				
10 (MR Covid)	Meningkatkan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Data peg ITJEN dan PPNPN terpapar covid (suspect, probabel, kontak erat, konfirmasi, sembuh,	4			Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	1				
13 (MR Covid)	Mengurangi Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	jumlah temuan kesalahan penggunaan MAK covid	0			Persentase temuan audit terkait pembiyaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0%				

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Untuk perbaikan level risiko 1 sd 25. lebih lihat dampaknya, semakin berdampak maka level nya makin tinggi bukan hanya $1*5=5$

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1 PEGAWA I	2 SATKE R/UPT	3 KANWIL (ESELON II)	4 UNIT UTAMA	5 KEME NTERI
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5
			Level dimulaidari		Deskripsi		
Warna			Level	Status Risiko	Status Risiko		
Merah			5	21	Sangat Tinggi		
Oranye			4	16	Tinggi		
Kuning			3	11	Sedang		
Biru			2	6	Rendah		
Hijau			1	1	Sangat Rendah		

MANAJEMEN RISIKO



**DI LINGKUNGAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
INSPEKTORAT WILAYAH
TAHUN 2022**

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)
2			Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	IACM level 4 belum tercapai
3		Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Belum seluruh satuan kerja menerapkan Manajemen Risiko
4			Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan
5			Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/pengembalian ke kas negara (minimal 62%) dan terkait administrasi (minimal 82%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi
6			Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara (minimal 22%) dan terkait Administrasi (minimal 78%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi
7			Persentase satuan kerja dilingkungan ITWIL I, II, III, IV, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM (6% per ITWIL)	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)			0 (Nol) kasus penyusutan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusutan beserta mitigasinya yang tepat
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)			Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah
 Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	Risiko Reputasi	Inspektorat Wilayah	Manajemen risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh	eksternal	C dan UC	Menurunnya citra APIP dimata satuan kerja dan menurunnya level maturitas SPIP (IKU ITJEN)	Kemenkumham	Peningkatan kompetensi dan sarana prasarana APIP	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi
2	sda	IACM level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Sumber daya belum memadai - Administrasi tidak tertib - Belum adanya regulasi yang mendukung - Ketidaktahuan terhadap mekanisme penilaian.	Internal	C	penurunan reputasi dan penurunan kinerja	Kemenkumham	Self assessment yang dilakukan oleh intern Itjen	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)
3	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Belum seluruh satuan kerja menerapkan Manajemen Risiko	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Belum seluruh satuan kerja memahami bagaimana cara menyusun penerapan manajemen risiko	Internal	C	dapat memengaruhi tingkat maturitas SPIP	Kemenkumham	pendampingan penyusunan manajemen risiko satuan kerja	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko
4 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Kurangnya informasi yang diperoleh auditor dan komunikasi dengan stakeholder; - Kurangnya kompetensi auditor; - Kurang tepatnya penerapan manajemen risiko satuan kerja	Internal	C	terjadi operasi tangkap tangan maupun kerugian negara	Kemenkumham	Audit Barjas, Audit kinerja tugas dan fungsi audit pengelolaan keuangan negara, audit sertijab	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
5 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/pengembalian ke kas negara (minimal 62%) dan terkait administrasi (minimal 82%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	Temuan berulang	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan APIP yang berulang yang sifatnya administrasi, sehingga satker enggan menindaklanjuti -adanya pergantian Kepala Satker sehingga tidak mengetahui adanya temuan dimaksudkan adanya temuan berulang	Internal dan Eksternal	C dan UC	Temuan hasil pengawasan itjen terus bertambah, dimungkinkan satker tidak bisa ikut ajang WBK/WBBM	Kemenkumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan APIP secara berkala	Temuan berulang
6 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara (minimal 22%) dan terkait Administrasi (minimal 78%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan BPK terkait kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti -adanya temuan tahun yang telah lama namun belum ada kesepakatan antara ITJEN dengan BPK tentang prosesnya -Perbedaan data SIPTL dengan database ITJEN	Internal dan Eksternal	C dan UC	Meurunnnya kinerja ITJEN dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan terkait kerugian negara	Kemenkumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK secara berkala melalui mekanisme SPITL	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak
7 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Presentase satuan kerja dilingkungan ITWIL I, II, III, IV, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM (6% per ITWIL)	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Satuan kerja yang diusulkan belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan	Internal	C	Satker yang diusulkan belum memperoleh predikat WBK/WBBM	Kemenkumham	-workshop pembangunan ZI -Pencanangan ZI -disusunnya Permenkumham no.6 th 2020 tentang perubahan permenkumham nno 29 th 2019 tentang pembangunan Zona Integritas -Disusunnya assecor	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Kurangnya Pengawasan Berjenjang	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
	sda	sda	sda	sda	sda	Kurangnya Pemahaman Satker Terhadap Kebijakan Anti Suap di Inspektorat Jenderal	Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Kemenkumham	Kemenkumham	Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Pungutan Liar	-
	sda	sda	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evalausi, was lainnya)	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Internalisasi AAPII Nomor KEP-063/AAPII/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPII nomor S-01/AAPII/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evalausi, was lainnya)
	sda	sda	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Hasil Audit yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan	Kemenkumham	Internalisasi AAPII Nomor KEP-063/AAPII/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPII nomor S-01/AAPII/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan
	sda	sda	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Penjatuhan Hukuman disiplin yang tidak objektif	Kemenkumham	Penerapan PP No. 53 Tahun 2010, Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, Permenkumham No. 28 Tahun 2019, UU ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, SOP	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan
	sda	sda	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Internalisasi AAPII Nomor KEP-063/AAPII/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPII nomor S-01/AAPII /3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	Risiko Reputasi	ITJEN	Tidak dilakukannya proses pengecekan secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan ISO 37001:2016 dengan kondisi terkini	Internal	C	Penurunan kredibilitas ITJEN	Kemenkumham	a. melakukan proses pendampingan dengan tenaga ahli konsultan pendampingan dan sertifikasi ISO 37001:2016 (pihak ke 3) b. Melakukan kegiatan persiapan audit ISO 37001:2016	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016

KRITERIA RISIKO

- Risiko Kebijakan= Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
- Risiko Reputasi= Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
- Risiko Hukum= Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
- Risiko Keuangan= Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.
- Risiko Operasional= Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
- Risiko Pelaporan= Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
- Risiko Kepatuhan= Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
 Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
 Tanggal 19 Januari 2022
 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah
 Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	moderat	3	Kemenkumham	5	15	Kuning / sedang
2	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning / Sedang
3	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	moderat	3	Kemenkumham	5	15	Kuning / Sedang
4 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Pasti	5	Kemenkumham	5	25	Merah / Sangat tinggi
5	Temuan berulang	Hampir Pasti	4	Kemenkumham	5	20	Orange/ Tinggi
6	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Pasti	5	Kemenkumham	5	25	Merah / Sangat tinggi
7	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Hampir Pasti	4	Kemenkumham	5	20	Orange/ Tinggi
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reuiu, evalausi, was lainnya)	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning / Sedang
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning / Sedang
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning / Sedang
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning / Sedang
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning / Sedang

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
 Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
 Tanggal 19 Januari 2022
 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

INDIKATOR RISIKO							
Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah							
Periode Penerapan : Tahun 2022							
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko		Indikator Risiko	
						Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5		6	7
1	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	15	10	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%
2	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	12	5	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi penilaian IACM / Kapabilitas APIP yang belum selesai ditindaklanjuti	2%
3	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	15	11	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko	50%
4 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	25	1	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%
5	Temuan berulang	20	3	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%
6	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	25	2	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%
7	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	20	4	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	50%
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evalausi, was lainnya)	15	6	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	8	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	7	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan	15	9	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	15	12	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
 Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
 Tanggal 19 Januari 2022
 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

INDIKATOR RISIKO							
Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah							
Periode Penerapan : Tahun 2022							
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko		Indikator Risiko	
						Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5		6	7
1	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	15	10	10	(mengurangi kemungkinan)	Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%
2	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	12	5	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi penilaian IACM / Kapabilitas APIP yang belum selesai ditindaklanjuti	2%
3	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	15	11	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko	50%
4 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	25	1	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%
5	Temuan berulang	20	3	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%
6	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	25	2	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%
7	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	20	4	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	50%
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evalausi, was lainnya)	15	6	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	8	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	7	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan	15	9	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	15	12	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022

Tanggal 19 Januari 2022

Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%	Mengurangi Risiko	Penyusunan PKPT berbasis risiko berdasar pada peta risiko satuan kerja	PKPT berbasis risiko	1	November	Inspektorat wilayah	-
2	Persentase rekomendasi penilaian IACM / Kapabilitas APiP yang belum selesai ditindaklanjuti	2%	Mengurangi Risiko	Evaluasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi IACM	Laporan evaluasi	1	Agustus	Inspektorat wilayah	-
3	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko	50%	Mengurangi Risiko	Evaluasi/reviu atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1	Spetember	Inspektorat wilayah	-
4	Persentase APiP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%	Mengurangi Risiko	Jumlah kegiatan diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1	Desember	Inspektorat wilayah	-
5	Persentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APiP	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen	-
6	Persentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen	-
7	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	40%	Mengurangi Risiko	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WB/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1	Juni	Inspektorat Wilayah (Tim TPI)	-
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuaipan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi/ internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) kepada pegawai ITJEN	laporan Sosialisasi/internalisasi / notula tentang giat anti suap	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0	Mengurangi Risiko	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12	Januari sd Desember	Inspektorat Wilayah	-
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0	Mengurangi Risiko	Melakukan reviu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukdis	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	Mengurangi Risiko	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	Mengurangi Risiko	melakukan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi dan sosialisasi/internalisasi kebijakan anti suap (ISO SMAP)	Laporan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi, laporan Sosialisasi/ internalisasi ISO SMAP	2	Maret	Inspektorat Wilayah	-

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah
 Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6= (5/4)x100	7	8	9	10= (9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
1	Penyusunan PKPT berbasis risiko berdasar pada peta risiko satuan kerja	PKPT berbasis risiko	1			Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%				
2	Evaluasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi IACM	Laporan evaluasi	1			Persentase rekomendasi penilaian IACM / Kapabilitas APIP yang belum selesai ditindaklanjuti	2%				
3	Evaluasi/reviu atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1			Persentase satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko	50%				
4	Jumlah kegiatan diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1			Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%				
5	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APIP	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%				
6	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%				
7	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WB/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1			Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	40%				
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan sosialisasi/ internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) kepada pegawai ITJEN	laporan Sosialisasi/internalisasi/ notula tentang giat anti suap	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0				
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0				
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan reviu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukdis	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0				
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0				
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	melakukan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi dan sosialisasi/internalisasi kebijakan anti suap (ISO SMAP)	Laporan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi, laporan Sosialisasi/ internalisasi ISO SMAP	2			Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0				

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Untuk perbaikan level risiko 1 sd 25. lebih lihat dampaknya, semakin berdampak maka level nya makin tinggi bukan hanya $1 \times 5 = 5$

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1 PEGAWA I	2 SATKE R/UPT	3 KANWIL (ESELO	4 UNIT UTAMA	5 KEME NTERI
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5
			Level dimulaidari		Deskripsi		
Warna			Level	Status Risiko	Status Risiko		
Merah			5	21	Sangat Tinggi		
Oranye			4	16	Tinggi		
Kuning			3	11	Sedang		
Biru			2	6	Rendah		
Hijau			1	1	Sangat Rendah		

MANAJEMEN RISIKO



**DI LINGKUNGAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2022**

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal				
Periode Penerapan : 2022				
No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (67.0)	Hasil survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham
2	sda	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN (Target 34,92)	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik
	sda	sda	Nilai SAKIP ITJEN "Baik" (Target 82,89)	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja individu
	sda	sda	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen
3	sda	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi (85.%)	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN Layanan kepegawaian belum optimal
	sda	sda	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN
4	sda	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal (84%)	Perencanaan Sistem Informasi pengawasan belum memiliki grand design
5	sda	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel (87%)	Manajemen aset yang belum optimal
	sda	sda	sda	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER
	sda	sda	sda	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan	
1	2	3	4	5	
		sda	sda	Inventarisasi BMN tidak update	
		sda	sda	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	
		sda	sda	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	
	sda	sda	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Laporan keuangan ITJEN tidak akuntabel
			sda	sda	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL
			sda	sda	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen
			sda	sda	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron
			sda	sda	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu
					Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai
			sda	sda	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai
sda	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan			
sda	sda	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar			
6 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	sda	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memberikan penilaian pada target kinerja ITJEN yang diturunkan ke Kantor Wilayah	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat	
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	
		Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional (LG-2)	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi,promosi,kenaikan pangkat dan pengelolaan mutasi,promosi,kenaikan pangkat dan pengelolaan)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	
		Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	
		Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan	

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan gratifikasi	Layanan SIPIDU belum optimal
		Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Efektifitas kerjasama belum optimal

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (67.0)	Hasil survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Resiko Operasional	Tim Saber Pungli ITJEN	Kegiatan UPP belum terencana	Internal	C	-Terjadinya pungutan liar -Adanya OTT pegawai kemenkumham	Kemenkumham	UPP menjadi level output dalam postur anggaran	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan
2	Indeks RB ITJEN (Target 34,92)	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Kurangnya komitmen seluruh pegawai ITJEN dalam mengimplementasikan RB	Internal	C	Implementasi pelaksanaan RB ITJEN tidak optimal menunjang implementasi pelaksanaan Rb kemenkumham	Inspektorat Jenderal	Workshop dan PKS PMPRB, Pembentukan SK Tim RB ,, pelaksanaan penguatan RB melalui mekanisme rapat, pembentukan agen perubahan	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya
						Tim RB yang ditetapkan dengan SK Irjen kurang bekerja sesuai uraian tugas da tidak tepat waktu	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Koordinasi pelaksanaan tugas Tim RB dengan Bagian PHP	
3	Nilai SAKIP ITJEN "Baik" (Target 82,89)	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Penyusun LAKIN ITJEN belum mengikuti diklat penyusunan LAKIN	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	Mengikuti workshop evaluasi SAKIP	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya
	sda	sda	sda	sda	sda	hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai data punish and reward	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Menyusun indikator kinerja level eselon 1 sd level eselon IV dan JFA	
	sda	sda	sda	sda	sda	sda	Belum disusun LAKIN per unit eselon II ITJEN	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda	sda	sda	Anggaran dalam RKAL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAL kurang efektif efektif , sehingga sering kali melakukan revisi DIPA/Anggaran pada tahun berjalan	Inspektorat Jenderal	Menyusun kebutuhan anggaran di Des TA berjalan untuk untuk TA. X+1	
				sda							Menyusun postur anggaran TA.X+1 untuk memudahkan dalam perencanaan kinerja	
				sda							Men kunci usulan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL saat periode pagu anggaran	
	sda	sda	sda	sda	sda	Program kerja yang telah tersusun dalam PKPT, dalam pelaksanaan kegiatannya masih berubah tidak sesuai dengan PKPT terutama kegiatan untuk pemenuhan target IKU dan IKK	Internal	C	Jadwal pelaksanaan program pengawasan tidak sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan yang telah ditetapkan, mengakibatkan Bagian Keuangan kesulitan dalam menyediakan penganggarannya	Inspektorat Jenderal	Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian di lingkungan Itjen perihal pelaksanaan program kerja agar memperhatikan kegiatan yang telah tersusun dalam PKPT dan bila ada perubahan agar memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
4	sda	#REF!	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	RENJA disusun diawal tahun, tidak diupdate diperiode pagu anggaran dan alokasi anggaran	Internal / Eksternal	C / UC	Salah menetapkan target dan besaran anggaran dalam Perjanjian Kinerja, yang seharusnya data antara RENJA, RKA-K/L dan Perjanjian Kinerja adalah sama, sehingga akan berdampak pada saat penyusunan evaluasi kinerja program maupun kegiatan	Inspektorat Jenderal	-Meningtensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian bahwa data yang tertuang dalam RENJA, dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. -Mengupdate aplikasi RKAKL pada aplikasi satudja.kemenkeu.go.id -mengupdate data GPP gaji dari Bagian keuangan dalam aplikasi RKAKL pada setiap periode penyusunan pagu -mengupdate data pegawai dalam aplikasi RKAKL per golongan dari Bagian kepegawaian -mengupdate data RENJA dalam aplikasi KRISNA per periode penyusunan pagu	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja
5	sda	#REF!	Indikator Kinerja kurang memenuhi kriteria SMART		Sekretariat ITJEN	Indikator disusun belum berbasis outcome	Internal	C	Indikator Kinerja tidak bisa dihitung capaian targetnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MENPAN dan APIP terkait penyusunan Indikator Kinerja berbasis SMART	-
6	sda	#REF!	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun		Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	-RPJMN terlambat ditetapkan oleh Presiden -Kurang penyamaan persepsi tentang pembuatan Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, potensi, permasalahan,, sasaran strategi, langkah strategi, indikator Kinerja Utama, indikator kinerja Kegiatan Target yang akan dicapai dan kerangka kebijakan, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan dalam waktu lima tahun	Internal/ Eksternal	C / UC	Salah menetapkan Peta Strategi	Inspektorat Jenderal	Pendampingan dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MENPAN dan APIP terkait penyusunan RENSTRA Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan selaku penyusun RENSTRA KEMENKUMHAM agar RENSTRA ITJEN searah dengan RENSTRA KEMENKUMHAM Membuat analisis SWOT dan TOWS atas Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada ITJEN Melakukan evaluasi atas capaian target RENSTRA ITJEN periode lima tahun sebelumnya	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
7	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Kompetensi SDM penyusun laporan penyelenggaraan SPIP kurang memahami 5 unsur pengendalian SPIP yang wajib dituangkan dalam laporan	Internal	C	menurunnya nilai pelaksanaan maturitas SPIP ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Penyusunan Laporan SPIP -mengikuti workshop SPIP -menyusun SK Tim Penyelenggaraan SPIP	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya
	sda	sda	sda	sda	sda	Rekomendasi maturitas SPIP belum di tindaklanjuti seluruhnya	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Melakukan perbaikan penyelenggaraan maturitas SPIP ITJEN sesuai dengan rekomendasi	
8	sda	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Manajemen risiko belum menjadi bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja ITJEN tidak disusun berdasar penerapan manajemen risiko ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Menyusun Penerapan manajemen Risiko ITJEN per tahun, disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja -melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko -melaksanakan penanganan penerapan manajemen risiko -melaksanakan pemantauan penanganan penerapan manajemen risiko -menyusun laporan penerapan manajemen risiko ITJEN	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem
9	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi (85.%)	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	Risiko Reputasi	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	-Kurangannya anggaran DIKLAT	Eksternal	UC	Kinerja ITJEN tidak optimal	Kemenkumham	-Menyelenggarakan PKS, Workshop, FGD untuk memenuhi pengembangan kompetensi selain Diklat -Mengajukan diklat ke BPSDM -Sharing knowledge	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting
	sda	sda	sda	sda	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Penempatan Pegawai belum sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun per jabatan	Internal	C	Terdapat ITWIL/Bagian yang tidak mendapatkan pegawai hasil rekrutmen sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan	Inspektorat Jenderal	-Menyampaikan usulan penambahan pegawai sesuai analisis beban kerja - Penetapan Formasi Jabatan	
	sda	sda	sda	sda	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Pola mutasi internal dalam melakukan pengembangan karir belum dilakukan mutasi antar jabatan secara berkala	Internal	C	-Rawan terjadi konflik dan benturan kepentingan -Dapat menghambat pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan	Inspektorat Jenderal	-Rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar Jabatan Administrasi, Fungsional Umum (JFU), dan Fungsional Tertentu (JFT) -Mutasi Diagonal	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
10	sda	Layanan kepegawaian belum optimal	Keterlambatan memberikan Layanan kepegawaian kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan terlambat	Internal / Eksternal	C / UC	-Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan karir pegawai menjadi terhambat - Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan berkurangnya hak-hak finansial pegawai	Inspektorat Jenderal	Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, gaji berkala di awal tahun anggaran	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Keterlambatan terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan	External	UC	Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan KN	Inspektorat Jenderal	Melakukan konsiyering perihal kenaikan pangkat dan jabatan ke biro kepegawaian sekjen	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Simpeg tidak dilakukan <i>update</i> data secara berkala	Internal	C	Informasi data pegawai tidak akurat	Kemenkumham	-Melakukan update data oleh admin internal itjen - Melakukan rekon data pegawai antar bagian	-
	sda	sda	Tidak tercapainya target pengisian LHKASN dilingkungan Kemenkumham	Resiko Operasional	sda	Tidak updatenya data pegawai Wajib Lapor LHKASN	Internal	C	Tidak tercapainya pengisian LHKASN di lingkungan Kemenkumham	Kemenkumham	Sosialisasi mengenai LHKASN dan aplikasi pengisian LHKASN serta melakukan pendalaman terkait LHKASN kepada Admin LHKASN masing-masing satuan kerja	-
11	sda	sda	Pegawai ITJEN terlambat melaporkan LHKPN	Resiko Operasional	sda	-Adanya penambahan fitur tata cara penginputan aplikasi -Kurang respon pegawai yang wajib lapor LHKPN	Internal / Eksternal	C / UC	Keterlambatan pengisian LHKPN di Lingkungan Itjen	Kemenkumham	- PKS tata cara pengisian LHKPN - Sosialisasi	-
12	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	sda	Belum ada mekanisme internalisasi tata nilai Kemenkumham	Internal	C	Pelanggaran meningkat Tingkat persepsi integritas menurun	Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal	-Whorkshop budaya kerja -arahan pimpinan	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun
									Kepercayaan terhadap ITJEN menurun	Inspektorat Jenderal	-Menetapkan agen perubahan	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
						Tidak ada evaluasi terhadap para aagen perubahan / pegawai yang telah mengikuti TOT Tunas Integritas	Internal	C	Tidak ada role model / agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Diklat Settifikasi " Role Model / Agen Perubahan" dengan KPK dan lembaga pengembangan integritas - PKS integritas/ revolusi mental	
13	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal (84%)	Perencanaan Sistem Informasi pengawasan belum memiliki grand design	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Formasi SDM ITJEN yang memilki latar belakang Teknologi Informasi belum terpenuhi	Eksternal	C	Kemajuan TI -ITEN tertinggal dibandingkan dengan TI unit eselon I lainnya	Inspektorat Jenderal	- Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang
								UC	Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi informasi terutama terkait pelaksanaan audit	Inspektorat Jenderal	-Diklat e-audit -Diklat TI	
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum adanya perencanaan / grand design terkait Pengembangan teknologi Informasi	Internal	C	Informasi terkait hasil pengawasan belum optimal	Inspektorat Jenderal	Integrasi SIMWAS dan e-office	
	sda	sda	sda	sda	sda	Koneksi jaringan internet terputus	Internal	C	Penggunaan bandwidth tidak tepat guna	Inspektorat Jenderal	Penerapan bandwidth manager, firewall dan anti spyware	
	sda	sda	sda	sda	sda	Internet Service Provider down	Eksternal	UC	Koneksi internet terputus	Inspektorat Jenderal	Memakai lebih dari satu provider	
	sda	sda	sda	sda	sda	Terkena spyware dan banyak terinstall add on	Internal	C	Performa PC dan laptop rendah	Inspektorat Jenderal	Penggunaan firewall dan antivirus	
	sda	sda	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Risiko Operasional	sda	Pengembangan sistem informasi belum mengakomodir kebutuhan	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektorat Jenderal	Pengembangan SIMWAS	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar
	sda	sda	sda	sda	sda	penginputan data hasil pengawasan tidak dilakukan secara tepat waktu	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan hasil pengawasan pada aplikasi SIMWAS	
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum dilakukan analisis terhadap hasil SIMWAS	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Dilakukan analisis atas hasil pengawasan	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	belum optimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (layanan pengguna)	Eksternal	UC	Masyarakat tidak dapat menggunakan layanan pegaduan secara optimal	Kemenkumham	Penyebaran informasi layanan pengaduan kepada masyarakat, adanya jaminan kerahasiaan pelapor. Dan membangun SIPIDU dan E WAS (sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu)	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan
	sda	sda	Data Hukuman Disiplin tidak update	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	Satker belum seluruhnya menyampaikan laporan data rekapitulasi hukuman disiplin pegawai	Eksternal	UC	Data belum terupdate pada database itjen	Inspektorat Jenderal	Surat edaran tertib administrasi laporan hukuman disiplin pegawai serta pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin dalam aplikasi SIMWAS VERSI 3.0	Data Hukuman Disiplin tidak update
	sda	sda	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	Tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK belum dituntaskan dalam SIPTL	Eksternal	UC	Masih ada temuan lama hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat Jenderal	Surat edaran Irjen perihal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK	Data temuan tidak update
	sda	sda	sda		sda	SIMWAS belum terintegrasi dengan SIPTL	Internal	C	Tidak dapat menyajikan data perkembangan tindak lanjut secara realtime	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan BPK untuk mengintegrasikan SIMWAS dan SIPTL	
	sda	sda	sda		sda	Kesalahan penginputan data dalam SIMWAS dan SIPTL	Internal	C	Keterlambatan tindak lanjut	Inspektorat Jenderal	Kelengkapan data pendukung	
	sda	sda	sda		sda	Hasil pengawasan APIP terlambat diinput dalam SIMWAS	Internal	C	Pengelolaan data hasil pengawasan yang tidak update	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan temuan hasil pengawasan pada aplikasi simwas	
14	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel (87%)	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Operator BMN belum menyusun PSP atas BMN yang ada	Internal	C	1. Administrasi pengelolaan BMN belum tertib 2. Alokasi anggaran pemeliharaan terbatas	Inspektorat Jenderal	1. Melakukan inventarisasi ulang seluruh BMN yang belum di PSP 2. Mempercepat proses PSP	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)
	sda	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui pimpinan	Informasi materi surat terlambat diterima pimpinan	Risiko Operasional	sda	Sisumaker sering down	Eksternal	UC	Pimpinan tidak dapat mendisposisikan secara tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan PUSDATIN KEMENKUMHAM	-
	sda	sda	Informasi materi surat terlambat dikirim ke unit terkait	Risiko Operasional	sda	Rendahnya respon dari penerima pesan	Internal	C	Informasi terlambat diterima oleh uit terkait	Inspektorat Jenderal	adanya SOP SISUMAKER	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/	Risiko Operasional	sda	Kurang SDM JFT Arsiparis	Internal	C	Penumpukan arsip	Inspektorat Jenderal	SOP Pengarsipan (jadwal retensi arsip)	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum dilaksanakan retensi arsip	Internal	C	Pengelolaan Arsip kurang optimal	Inspektorat Jenderal	Penambahan JFT Arsiparis	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Gudang arsip yang beralokasi ditanggerang sebagian digunakan bukan untuk penempatan arsip	Internal	C	Gudang arsip di tanggerang menjadi sempit / terbatas/ tidak dapat menampung arsip	Inspektorat Jenderal	Gudang Arsip ditanggerang sudah difungsikan sebagai gudang arsip secara penuh, tidak ada lagi fungsi lain selain untuk arsip	-
	sda	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	sda	sda	Inventarisasi aset BMN tidak dilaksanakan secara periodik	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN wajib dilaksanakan secara periodik	Aset BMN hilang
	sda	sda	sda	sda	sda	Pemindahan aset BMN antar ruangan tidak dilakukan sesuai prosedur	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN tiap ruangan	
	sda	sda	sda	sda	sda	Aset BMN dibawa pegawai tidak sesuai dengan prosedur	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Penomoran aset	
	sda	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang belum optimal	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag. Umum)	Belum memiliki rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan jangka panjang 5 sd 10 tahun ke depan	Eksternal	UC	APIP dalam melakukan pengawasan belum bekerja secara maksimal	Inspektorat Jenderal	Sudah menyusun RKBMN	-
	sda	sda	Kebakaran Gedung	Risiko Operasional	sda	Konsleting listrik, merokok tidak pada tempatnya	Internal	C	Kerugian materil dan immaterial	Inspektorat Jenderal	Membuat aturan dilarang merokok di dalam gedung terkecuali di ruangan yang telah ditentukan dan ada ventilasi udaranya. Simulasi kebakaran untuk semua pegawai	-
	sda	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Pengadaan telat dilaksanakan	Risiko Operasional	KPADan ULP	ULP, Pejabat pengadaan dan PPK kurang respon	Internal	C	realisasi anggaran tpengadaan tidak terserap sesuai Procurement plan	Inspektorat Jenderal	-Menyusun RUP -Lelang Pra DIPA	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
15	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Laporan keuangan ITJEN tidak akuntabel	Kesalahan penyajian dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	RisikoKeuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten di bidang Akuntansi Pemerintahan	Internal	C	Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal menjadi penyumbang tidak WTP-nya Laporan Keuangan Kementerian	Kemenkumham	- Mengikuti Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) - Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntansi Pemerintahan	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan
sda	sda	sda	sda	sda	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Update Aplikasi SAIBA yang tidak sinkron dengan update Aplikasi SIMAK BMN	Eksternal	UC	Munculnya perbedaan data antara data SAIBA dengan data SIMAK BMN	Kemenkumham	- Berkoordinasi dengan KPPN dan KPKNL - Berkoordinasi dengan Biro Keuangan - Rekonsiliasi data Laporan Keuangan	-
sda	sda	sda	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Adanya perubahan/ perbaikan pada data Kontrak/SPK karena data yang disajikan tidak lengkap	Internal	C	Adanya pengenaan denda keterlambatan	Inspektorat Jenderal	Melakukan koordinasi dengan ULP dan Penyedia	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani
sda	sda	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Perbedaan data realisasi penyerapan anggaran di Bagian Keuangan dengan Itwil/Bagian	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Keterlambatan dalam menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan pencatatan pertanggungjawaban	Internal	C	Realisasi anggaran tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Bagian keuangan dan Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan supaya segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar setelah kegiatan selesai dilaksanakan	-
sda	sda	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Data dukung untuk persyaratan proses penyelesaian administratif Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi belum diserahkan oleh Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan kepada Tim TP/TGR	Internal	C	Adanya kerugian negara yang belum dapat dikembalikan/ dilakukan penyetoran ke kas negara	Kemenkumham	Permenkumham Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Kemenkumham	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan
sda	sda	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	Perbedaan antara data SAIBA dan data SIMAK BMN	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Adanya perbedaan pemahaman dan ketidak telitian antara operator SAIBA dan SIMAK BMN sehingga terjadi kesalahan dalam penginputan ke dalam aplikasi	Internal	C	Penyusunan Laporan Keuangan menjadi terhambat	Kemenkumham	- Melakukan koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Umum - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal antara operator SAIBA dengan operator SIMAK BMN	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	Pembayaran tagihan dari pihak ketiga/penyedia yang terlambat/belum diselesaikan	Risiko Keuangan	Ses Itjen (Bag.Keu)	Pihak ketiga/penyedia terlambat dalam menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran	Eksternal	U/C	1. Pembayaran tagihan menjadi terlambat 2. Menimbulkan piutang pihak ketiga yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berikutnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan pihak ketiga/penyedia supaya penyampaian tagihan dapat dilakukan segera sesuai jadwal yang telah disepakati dengan didukung dengan data yang lengkap	-
	sda	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan belum ditunjang dengan kompetensi yang memadai	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Terdapat Bendahara yang belum mengikuti Diklat Perbendaharaan	Internal	U/C	Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kurang akuntabel	Inspektorat Jenderal	Mengusulkan Bendahara yang belum memiliki Sertifikasi untuk segera diikutsertakan Diklat Perbendaharaan atau mengikuti Bimtek tentang Perbendaharaan	-
16	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag.Keu)	Pengajuan usulan anggaran berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja pengelolaan uang persediaan rendah	Inspektorat Jenderal	-Membuat surat edaran Ses. ITJEN terkait batasan waktu usulan RAB dan KAK Pelaksanaan Kegiatan -Menunda pemberian uang kegiatan selanjut sebelum pertanggungjawaban yang terdahulu diselesaikan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan
	sda	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Pelaksana kegiatan tidak segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi seluruh dokumen penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan
	sda	sda	sda	sda	sda	Dokumen realisasi belanja dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak memenuhi kriteria lengkap dan benar	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang belum melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda	sda	sda	PPK dan Pejabat Penguji SPM belum optimal dalam melakukan pengujian bukti tagihan	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	KPA meningkatkan pengendalian intern kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM dalam melakukan pengujian bukti tagihan maupun pembayaran	-
	sda	sda	Pagu Minus dalam pengelolaan anggaran	Risiko Operasional	Ses.ITjen (Bag.Keu)	Kesalahan pembebanan, penambahan belanja pegawai	Internal	C	Terdapat pagu yang minus antar kegiatan/ komponen/ sub komponen	Inspektorat Jenderal	- Pengajuan RAB pada saat penyusunan RKA-K/L maupun pada saat usulan Revisi wajib memperhatikan PMK tentang Bagan Akun Standar dan Realisasi SPAN - Revisi sebelum batas waktu revisi ditutup	-
	sda	sda	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Kesalahan Pengajuan RAB	Internal	C	Pembayaran anggaran kegiatan tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Membayarkan anggaran kegiatan sebesar 80% dari Pagu yang diajukan	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Verifikasi tidak dilakukan secara teliti	Internal	C	Kesalahan jumlah anggaran yang dibayarkan	Inspektorat Jenderal	mereviu kembali KAK dan RAB pelaksanaan yang diajukan oleh ITWIL/ Bagian	-
	sda	sda	anggaran perjalanan dinas belum dapat dibayarkan tepat waktu	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	kesalahan MAK dalam pengajuan perjaldin	Internal	C	keterlambatan pembayaran kegiatan perjalanan dinas	Inspektorat Jenderal	1. sudah adanya SOP pengajuan perjaldin 2. verifikasi RAB oleh Kasub Perjaldin	-
	sda	sda	Gaji yang diterima pegawai lebih/ kurang	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Salah input data pada aplikasi GPP	Internal	C	Pengembalian/ pembayaran gaji oleh/ kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Verifikasi ulang data pegawai	-
	sda	sda	Tertambatnya pencairan anggaran	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Salah pembukuan pertanggungjawaban oleh bendahara	Internal	C	Anggaran kegiatan tidak tersedia	Inspektorat Jenderal	Supervisi oleh Kasub Perbendaharaan untuk setiap pertanggungjawaban	-
	sda	sda	Hilangnya berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Tidak tertib dalam pengarsipan berkas perjalanan dinas	Internal	C	Perjalanan Dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan cepat sesuai waktu yang ditetapkan	Inspektorat Jenderal	Penerapan klasifikasi arsip/ berkas berdasarkan Inspektorat Wilayah dan Bagian	-
	sda	sda	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Perhitungan pengajuan LS tidak tepat	Internal	C	Sisa anggaran LS tidak dapat dipergunakan kembali	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB yang diajukan	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	Update data pegawai pada aplikasi GPP bermasalah	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Terlambatnya pengajuan gaji pegawai ke KPPN	Eksternal	UC	Terlambatnya pembayaran gaji kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Mengupdate aplikasi GPP	-
17 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	-Potensi penyusunan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Potensi penyusunan oleh POKJA kepada Kasub KRB	Risiko Kepatuhan	Sekretraiat ITJEN (Bagian PHP)	Data dukung RB, SAKIP dan SPIP disampaikan oleh masing-masing pokja tidak lengkap	Internal dan eksternal	C dan UC	Nilai RB, SAKIP dan ITJEN buruk	Inspektorat Jenderal	Koordinasi POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN untuk menyampaikan laporan per triwulan secara tepat waktu	-Potensi penyusunan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Potensi penyusunan oleh POKJA kepada Kasub KRB
18 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memberikan penilaian pada target kinerja ITJEN yang diturunkan ke Kantor Wilayah	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	Risiko Kepatuhan	Sekretraiat ITJEN (Bagian PHP)	Belum adanya kriteria baku dalam penilaian capaian kinerja Kantor Wilayah	Internal dan eksternal	C dan UC	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat (bias)	KANWIL	Verifikasi bertahap atas hasil penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL
19 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Risiko Kepatuhan	Sekretraiat ITJEN (Bagian PHP)	Belum ada rumusan / formulasi baku tentang pembagian pagu belanja non operasional di ITJEN	Internal	C	pembagian pagu non operasional per ITWIL/Bagian secara tidak obyektif	Inspektorat Jenderal	Mengevaluasi dari capaian output, capaian indikator kinerja kegiatan dan realisasi anggaran 2 minimal tahun sebelumnya	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
20 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi, promosi, kenaikan pangkat dan pengelolaan umum kepegawaian lainnya)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Kepegawaian)	Penyelesaian urusan kepegawaian di luar SOP	Internal	C	Tidak terpenuhinya hak-hak pegawai	Pegawai ITJEN	Mengoptimalkan kinerja bagian kepegawaian sesuai dengan SOP	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.
21 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Umum)	Pengendalian terkait pengadaan barang/jasa dari internal ITJEN belum optimal	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan SOP	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan
22 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam percepatan pemberian anggaran kegiatan	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Keuangan)	Pemberian layanan keuangan tidak sesuai SOP	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Menyusun rekapitulasi pengajuan anggaran harian	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan
23 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	User ID dan Password tidak terbatas pada pegawai tertentu	Internal	C	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Inspektorat Jenderal	-User ID dan pasword khusus untuk pegawai -fakta integritas	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server
24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Tidak update input data dalam SIMWAS maupun SIPTL	Internal dan eksternal	C dan UC	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Kemenkumham	Rekon Internal ITJEN maupun dengan BPK/BPKP/ORI	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Belum adanya SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Internal dan Eksternal	C/ UC	Menurunkan citra ITJEN	Kemenkumham	Reviu berjenjang oleh pimpinan	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai
26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan gratifikasi	Layanan SIPIDU belum optimal	Potensi tidak memproses pengaduan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Adanya intervensi dari pihak internal/eksternal	Internal dan Eksternal	C/ UC	Pengaduan tidak ditindaklanjuti	Kemenkumham	Melakukan monitoring atas pengaduan yang diterima secara berkala	Potensi tidak memproses pengaduan
27	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Efektifitas kerjasama belum optimal	potensi Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Monitoring Evaluasi perjanjian kerja sama belum dilaksanakan	Internal dan Eksternal	C/ UC	Belum diketahui efektif tidaknya kerjasama yang telah dilaksanakan	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan kerjasama dengan K/L/Instansi lainnya	potensi Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU

KRITERIA RISIKO

Risiko Kebijakan= Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan

Risiko Reputasi= Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif

Risiko Hukum= Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.

Risiko Keuangan= Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.

Risiko Operasional= Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional

Risiko Pelaporan= Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.

Risiko Kepatuhan= Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
 Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
 Tanggal 19 Januari 2022
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
2	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
3	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
4	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
5	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
6	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
7	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
8	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
9	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
10	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
11	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
12	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
13	Data Hukuman Disiplin tidak update	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	5	15	Kuning
14	Data temuan tidak update	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	5	15	Kuning
15	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
16	Aset BMN hilang	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
17	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
18	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
19	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
20	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Sangat Kecil	1	Kemenkumham	4	4	Hijau
21	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
22	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
23	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	-Potensi penyuaipan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Potensi penyuaipan oleh POKJA kepada Kasub KRB	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	Sangat Kecil	1	KANWIL	3	3	Hijau
26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
27 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Kecil	2	Pegawai ITJEN	1	2	Hijau
28 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
29 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
30 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	Sangat Kecil	1	Kemenkumham	5	5	Hijau
31 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
32 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
33 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi tidak memproses pengaduan	Kecil	2	Kemenkumham	5	10	Biru
34	potensi Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan : Tahun 2022

No risiko	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman	
1	1	2	3	4	5	6		7
	1	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	10	4	10	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya		0
	2	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	8	11	8	Jumlah rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti		1
	3	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	8	12	8	Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti		2
	4	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	4	28	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada diarea dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)		
	5	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun	4	29	4			
	6	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	8	10	8	Persentase rekomendasi maturitas SPIP ITJEN yang belum ditindaklanjuti		2
	7	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	12	7	8	Persentase risiko yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut setelah mitigasi		80%
	8	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	10	3	10	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun		75%
	9	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	4	6	8	Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin		1%
	10	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	12	15	8	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan		20%
	11	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi	12	14	8	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor		5%

No risiko	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman	
1	1	2	3	4	5	6		7
	12	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	10	5	10	Persentase pemanfaatan sarana pengaduan		90%
	13	Data Hukuman Disiplin tidak update	15	1	10	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update		0,5%
	14	Data temuan tidak update	15	2	10	Persentase minimal data simwas dan SIPTL yang belum diupdate		10%
	15	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	4	30	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)		
	16	Aset BMN hilang	10	8	8	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset		0,5%
	17	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	12	13	8	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal		10%
	18	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan	10	9	8	Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan		0.5%
	19	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	8	25	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)		
	20	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	4	27	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)		
	21	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	12	17	8	Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan		20%
	22	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	12	16	8	Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan		95%

No risiko	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	1	2	3	4	5	6	7
	23	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	12	18	8	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%
	24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	-Potensi penyuapan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Potensi penyuapan oleh POKJA kepada Kasub KRB	4	32	4	-Jumlah kasus penyuapan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuapan oleh pokja kepada Kasub RB	0
	25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	3	31	4	Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0
	26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	4	33	4	Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0
	27 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	2	26	2	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0
	28 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	8	19	4	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0
	29 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	4	24	4	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan anggaran	0
	30 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	5	23	4	Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0
	31 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	10	22	4	Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0

No risiko	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	1	2	3	4	5	6	7
	32 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	10	20	4	Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0
	33 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi tidak memproses pengaduan	10	21	4	Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0
	34	potensi Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	4	34	3	Jumlah kejadian salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU. Namun Risiko tersebut yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru), berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	0

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
 Nomor ITJ-04.OT.02.01 TAHUN 2022
 Tanggal 19 Januari 2022
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat jenderal

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0	Mengurangi Risiko	Sosialisasi UPP	Rekomendasi hasil UPP ke Menkumham	1	desember tahun berjalan	Tim Sapu bersih pungli ITJEN dan Bagian SIP	
2	Jumlah rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti	1	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi RB ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi RB Itjen	1	Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
3	Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti	2	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi SAKIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi SAKIP Itjen	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite.	2	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi Maturitas SPIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi Maturitas SPIP Itjen	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
5	Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	80%	Mengurangi Risiko	Evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko di lingkungan Itjen	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2	Juli dan desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
6	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun	75%	Mengurangi Risiko	Kegiatan pengembangan diklat/ PKS/workshop/FGD, sosialisasi untuk kompetensi pegawai	Laporan evaluasi diklat yang berisi analisa kebutuhan diklat dengan diklat yang telah dipenuhi serta data kompetensi pegawai	2	Juli dan desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Kepegawaian)	
7	Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin	1%	Mengurangi Risiko	Internalisasi /pengarahan oleh pimpinan dan pemberian efek jera	Rekap data hukuman didiplin pegawai	1	Desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang	20%	Mengurangi Risiko	Penyusunan grand design sistem informasi ITJEN	Dokumen grand design TI Itjen	1	Oktober tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
9	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	5%	Mengurangi Risiko	Rekon data temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan auditor ITJEN dan BPK	Laporan rekon data temuan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
10	Persentase pemanfaatan sarana pengaduan	90%	Mengurangi Risiko	Rekon data pengaduan dengan auditor	Rekap data SIPIDU dan laporan rekon data pengaduan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
11	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	1%	Mengurangi Risiko	Rekon data Hukuman didiplot dengan auditor dan Biro kepegawaian	Laporan rekon data temuan	2	Semester	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
12	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	10%	Mengurangi Risiko	rekon data BMN dengan data inventaris per ruangan	Laporan Rekon data BMN	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	
13	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	0%	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan lelang sesuai dengan Disbushement plan dan RUP yang telah ditetapkan	Laporan realisasi kegiatan pengadaan	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	
14	Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan	1%	Mengurangi Risiko	Rekon pertanggungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Notula rekon berkala	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
15	Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan	20%	Mengurangi Risiko	Mempercepat kegiatan pembukuan keuangan agar realisasi SPAN bisa sama dengan pertanggung jawaban real yg telah diselesaikan Bgaian/Itwil	Data SPAN dan data yang belum di buk	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
16	Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	95%	Mengurangi Risiko	Monev hasil smart, monev hasil RKP dan hasil e-performance	Dokumen monev yang berisi Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	-
17	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%	Mengurangi Risiko	Penyusunan data pengajuan LS yang angagrannya kembali ke kas negara	Laporan data LS	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
18 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	-Jumlah kasus penyuapan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuapan oleh pokja kepada Kasub RB	0%	Mengurangi Risiko	Merubah susunan Tim RB, SPIP, SAKIP dan lainnya, dengan membagi per ITWIL dan per Bagian sebagai koordinator, sehingga bisa lebih fokus. Tidak lagi membagi perorangan dalam satu tim	Surat Keputusan Tim tentang Koordinator	1	Februari tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0%	Mengurangi Risiko	Membuat kriteria penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL, sehingga lebih independen dalam menilai Target Kinerja	Diskusi dengan Kasubbag Evalap dan staf tentang Kriteria Penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL	1	April, Juli, Okt dan Des Tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
20 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0%	Mengurangi Risiko	Membuat kriteria pembagian pagu non operasional per ITWIL/ Bagian berdasarkan realisasi dan capaian output serta jenis sub komponen kegiatan 2 tahun terakhir, sehingga lebih independen	Dokumen Kriteria Pembagian pagu belanja operasional	1	Periode pagu indikatif	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
21 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%	Mengurangi Risiko	Melaksanakan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	Laporan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	1	Juli tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Kepegawaian)	
22 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%	Mengurangi Risiko	Pendampingan oleh auditor pada saat proses pengadaan	Jumlah kegiatan pendampingan/reviu	1	November 2020	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	
23 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan anggaran	0%	Mengurangi Risiko	Membangun sistem antrian layanan keuangan	Sistem antrian layanan keuangan	1	Juni tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
24 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0%	Mengurangi Risiko	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data server (pembatasan akses)	Surat penunjukan pegawai	1	Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
25 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%	Mengurangi Risiko	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data temuan pengawasan dan pemeriksaan	Surat penunjukan pegawai		Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
26 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0%	Mengurangi Risiko	Menyusun SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	1	Juni tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
27 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0%	Mengurangi Risiko	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan KPK tentang WBS dan membangun integrasi sistem pengaduan	- Dokumen PKS - Integrasi aplikasi pengaduan (SIPIDU)	2	Desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Jumlah kejadian salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU. Namun Risiko tersebut yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru), berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)		Mengurangi Risiko	Melakukan monev berkala terkait kemitraan/kerjasama yang sedang berlangsung	Laporan Monev Kemitraan/Kerjasama	1	akhir tahun	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat jenderal

Periode Penerapan : 2022

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
1	Sosialisasi UPP	Rekomendasi hasil UPP ke Menkumham	1			Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0%				
2	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evalausi RB ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evalasi RB Itjen	1			Jumlah rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti	1				
3	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evalausi SAKIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evalasi SAKIP Itjen	1			Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti	2				
4	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi Maturitas SPIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evalasi Maturitas SPIP Itjen	1			Persentase rekomendasi maturitas SPIP ITJEN yang belum ditindaklanjuti	2				
5	Evaluasi atas pelaksanaan mitigasi riisiko dilingkungan Itjen	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2			Persentase risiko yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut setelah mitigasi	80%				
6	Kegiatan pengembangan diklat/ PKS/workshop/FGD, sosialisasi untuk kompetensi pegawai	Laporan evaluasi diklat yang berisi analisa kebutuhan diklat dengan diklat yang telah dipenuhi serta data kompetensi pegawai	2			Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun	75%				

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
7	Internalisasi /pengarahan oleh pimpinan dan pemberian efek jera	Rekap data hukuman didiplin pegawai Itjen	1			Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin	1%				
8	Penyusunan grand design sistem informasi ITJEN	Dokumen grand design TI Itjen	1			Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	20%				
9	Rekon data temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan auditor ITJEN dan BPK	Laporan rekon data temuan	4			Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	5%				
10	Rekon data pengaduan dengan auditor	Rekap data SIPIDU dan laporan rekon data pengaduan	4			Persentase pemanfaatan sarana pengaduan	90%				
11	Rekon data Hukuman didiplin dengan auditor dan Biro kepegawaian	Laporan rekon data temuan	2			Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	1%				
12	rekon data BMN dengan data inventaris per ruangan	Laporan Rekon data BMN	1			Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	10%				
13	Pelaksanaan lelang sesuai dengan Disbushement plan dan RUP yang telah di tetapkan	Laporan realisasi kegiatan pengadaan	1			Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	0%				
14	Rekon pertanggungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Notula rekon berkala	4			Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan	1%				
15	Mempercepat kegiatan pembukuan keuangan agar realisasi SPAN bisa sama dengan pertanggung jawaban real yg telah diselesaikan Bgaian/Itwil	Data SPAN dan data yang belum di bukukan	4			Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan	20%				

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
16	Monev hasil smart, monev hasil RKP dan hasil e-performance	Dokumen monev yang berisi Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	4			Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	95%				
17	Penyusunan data pengajuan LS yang angagrannya kembali ke kas negara	Laporan data LS	4			Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA ltjen	2%				
18 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Merubah susunan Tim RB, SPIP, SAKIP dan lainnya, dengan membagi per ITWIL dan per Bagian sebagai koordinator, sehingga bisa lebih fokus. Tidak lagi membagi perorangan dalam satu tim	Surat Keputusan Tim tentang Koordinator	1			-Jumlah kasus penyuaipan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuaipan oleh pokja kepada Kasub RB	0%				
19 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membuat kriteria penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL, sehingga lebih independen dalam menilai Target Kinerja	Diskusi dengan Kasubbag Evalap dan staf tentang Kriteria Penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL	1			Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0%				
20 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membuat kriteria pembagian pagu non operasional per ITWIL/ Bagian berdasarkan realisasi dan capaian output serta jenis sub komponen kegiatan 2 tahun terakhir, sehingga lebih independen	Dokumen Kriteria Pembagian pagu belanja operasioanl	1			Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0%				
21 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Melaksanakan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	Laporan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	1			Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%				

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
22 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Pendampingan oleh auditor pada saat proses pengadaan	Jumlah kegiatan pendampingan/reviu	1			Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%				
23 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membangun sistem antrian layanan keuangan	Sistem antrian layanan keuangan	1			Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan anggaran	0%				
24 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data server (pembatasan akses)	Surat penunjukan pegawai	1			Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0%				
25 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data temuan pengawasan dan pemeriksaan	Surat penunjukan pegawai	1			Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%				
26 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menyusun SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	1			Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0%				
27 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan KPK tentang WBS dan membangun integrasi sistem pengaduan	- Dokumen PKS - Integrasi aplikasi pengaduan (SIPIDU)	2			Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0%				
28	Melakukan monev berkala terkait kemitraan/kerjasama yang sedang berlangsung	Laporan Monev Kemitraan/Kerjasama	1			Jumlah kejadian salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU.	0%				

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Untuk perbaikan level risiko 1 sd 25. lebih lihat dampaknya, semakin berdampak maka level nya makin tinggi bukan hanya $1*5=5$

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1 PEGAWA I	2 SATKE R/UPT	3 KANWIL (ESELON II)	4 UNIT UTAMA	5 KEME NTERI
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5
			Level dimulaidari		Deskripsi		
Warna			Level	Status Risiko	Status Risiko		
Merah			5	21	Sangat Tinggi		
Oranye			4	16	Tinggi		
Kuning			3	11	Sedang		
Biru			2	6	Rendah		
Hijau			1	1	Sangat Rendah		



"Insan pengayoman yang sejati adalah mereka yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri menjadi benalu, parasit dan virus organisasi"

Razilu
Inspektur Jenderal